



# Hak Guna Bangunan

## Rawan Korupsi

- Sutarmidji Berusaha Tutup Dua Celah
- Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022
- Ketua MK-Pimpinan KPK Jadi Narasumber



**Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Presiden yaitu data, dan data itu harus benar. Data yang tidak benar itu ruang untuk terjadinya korupsi**

**Sutarmidji**  
Gubernur Kalbar

**PONTIANAK, TRIBUN** - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menilai ada dua ruang yang berpotensi menjadi celah untuk terjadinya korupsi. Hal tersebut disampaikan saat *Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022* di Auditorium Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Sabtu (12/11).

Pertama aturan yang terkadang remang-remang dan lamban dalam pengesahan satu aturan. Midji mencontohkan, misalnya dalam penggunaan aset pemerintah HGB (hak guna bangunan) di atas HPL (hak pengelolaan).

"Bapak bayangkan tarif yang berlaku sekarang aset empat miliar hak tarif iuran

HGB-nya hanya Rp 80 juta. Artinya besar sekali ruang orang untuk mendapatkan keuntungan dari HGB itu sendiri," ungkapnya saat menyampaikan kata sambutan.

Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya tindak korupsi pada celah yang menurutnya berpotensi tersebut, di Kalbar dirinya terapkan aturan HGB dikalikan 30. "Kalau dia ambil 30 tahun HGB-nya kali 30, kalau 20 tahun kali 20. Supaya ruang penyelenggara tidak ada, ruang swasta pun tidak ada untuk berspekulasi terha-

■ Bersambung ke hal. 7





## Hak Guna Bangunan Rawan Korupsi

Sambungan Hal.1

dap aset-aset itu," bebemnya. "Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dalam empat tahun ini sudah meningkat kurang lebih Rp 1,1 T untuk Provinsi Kalimantan Barat," timpalnya.

Kemudian yang kedua lanjut Midji, yakni terkait dengan data. "Saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Presiden yaitu data, dan data itu harus benar. Data yang tidak benar itu ruang untuk terjadinya korupsi," ungkapnya.

Kata midji, data yang tidak benar membuat ruang untuk terjadinya korupsi. Kemudian tafsiran-tafsiran aturan juga terkadang dapat merugikan ASN (aparatur sipil negara).

Midji mencontohkan, misalnya PPPK. PPPK itu misal dia tidak menikmati hasil dari kegiatan atau proyek yang salah, tapi dia juga harus bertanggung jawab.

"Kalau dia menikmati hasilnya, oke setuju, tapi seandainya dia tidak menikmati hasilnya tapi tanggung jawab secara jabatan, nah ini juga harus perlu diluruskan pengaturannya. Beberapa terjadi seperti itu," jelas Midji.

Terakhir, Midji menuturkan, itulah beberapa ruang-ruang yang menurutnya mesti diperbaiki agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi. "Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi, KPK, MPR, DPR, dan lembaga negara lainnya betul-betul sangat dibutuhkan untuk perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang le-

bih baik," ungkapnya. *Festival Konstitusi dan Anti Korupsi 2022* menghadirkan narasumber tokoh-tokoh nasional seperti Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Rektor Untan Garuda Wiko. Acara dipandu oleh Maria Assegaf.

### Godaan Korupsi

Menjawab pertanyaan soal masih adakah orang yang tergoda korupsi, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menjelaskan, cukup besar potensi seseorang untuk tergoda melakukan tindak korupsi.

Dia menekankan, semua hal yang berkaitan dengan uang sangatlah mengoda, sehingga keinginan untuk memiliki itu kemungkinan ada. Kendati demikian, dia menegaskan agar orang-orang jangan melakukan hal yang tidak baik tersebut (korupsi).

Untuk itu, melalui undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang 31 tahun 1999 dan perubahannya di tahun 2021. Dicantumkan bahwa untuk melakukan pemberantasan korupsi perlu adanya pencegahan.

Pencegahan tersebut bertujuan agar uang negara tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. "Yang ingin memanfaatkan uang negara notabene adalah uang-uang yang dikumpulkan dari warga negara diseluruh Republik Indonesia," paparnya.

Agar uang negara tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pihak yang berwenang harus melakukan pencegahan. Jika, orang yang tidak bertanggung jawab tersebut luput dari pantuan para penegak hukum, maka akan dilakukan penindakan melalui proses hukum.

"Dan bila terbukti, maka yang bersangkutan akan dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Penjara bisa sampai hukuman mati, seumur hidup dan terendah satu tahun (penjara)," tegasnya.

Oleh karena itu, sehubungan dengan kegiatan yang turut mensertakan mahasiswa, KPK meminta kepada mahasiswa sebagai penerus bangsa, agar bahu membahu untuk memberantas korupsi.

"Mahasiswa adalah orang-orang yang berintelektualitas tinggi yang diharapkan dapat membangun negeri ini menjadi negeri yang damai sejahtera," harap Johanis Tanak.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MK Anwar Usman mengatakan, ada empat kewenangan dan satu kewajiban mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2.

Pertama menguji Undang-Undang Dasar, kedua mengutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, ketiga membubarkan partai politik dan keempat memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

Kemudian ada satu kewa-

jiban yang diatur dalam pasal 24 Ayat 2, yaitu mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden.

"Nah dari empat kewenangan dan satu kewajiban ini tentu menyangkut semua hal, dan itulah yang disebut mahkamah konstitusi mengawal konstitusi," ujarnya

### Anugerah Konstitusi

Pada agenda ini, dilakukan juga Anugerah Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) kepada Kota Singkawang sebagai Kota Konstitusi. Anugerah tersebut diberikan secara langsung oleh Ketua MK RI, Anwar Usman kepada Wali Kota Singkawang di Auditorium Untan, Sabtu (12/11).

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penghargaan yang sudah diberikan kepada Kota Singkawang.

Selain itu, dirinya juga kembali mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi "Kota Singkawang bertoleransi mengawal konstitusi".

Dalam orasinya, Tjhai Chui Mie mengatakan, bertoleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan antar sesama, memperkuat persatuan dan melihat perbedaan sebagai keberagaman yang menyatukan. (ufi)